



RENCANA KERJA (RENJA PERUBAHAN) 2022

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
(BKPSDM)**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran – sasaran pembangunan, yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program provinsi dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Melalui Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur dan juga dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur dimasa mendatang.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga RENJA Perubahan ini dapat diselesaikan, kami sangat mengharapkan saran, pendapat maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan RENJA Perubahan BKPSDM Kab. Luwu Timur. Kami berharap RENJA Perubahan ini dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Luwu Timur khususnya dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Juli 2022

KEPALA BKPSDM

Dra. ROSMIYATI ALWI, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650110 198602 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM Kab. Luwu Timur.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	21
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM.....	29
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA BKPSDM Kab. Luwu Timur.....	43
3.3. Program dan Kegiatan.....	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	59
BAB V PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2021	8
Tabel 2.1.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM 2016-2021	21
Tabel 2.1.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDM berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017	22
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kab. Luwu Timur	23
Tabel 2.2.1	Target dan Realisasi Capaian Indikator Persentase Pejabat Struktural Daerah sd Tahun 2021	24
Tabel 2.2.2	Target dan Realisasi Capaian Indikator Persentase PNS yang mengikuti Diklat sd Tahun 2021	24
Tabel 2.2.3	Target dan Realisasi Capaian Indikator Pejabat Fungsional sd Tahun 2021	25
Tabel 2.2.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	28
Tabel 2.2.5	Jumlah Pegawai Non PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	28
Tabel 2.2.6	Jumlah Pegawai BKPSDM berdasarkan Pangkat dan Golongan	28
Tabel 2.2.7	Jumlah Pegawai BKPSDM berdasarkan Jabatan Struktural	28
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	32
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022	42
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2022	44
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2022	46
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2022	59

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1	Struktur Organisasi BKPSDM	27
-----------	----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Undang-Undang ini juga mewajibkan bagi semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja SKPD) yang merupakan panduan kerja bagi SKPD dan sebagai control bagi pencapaian target pembangunan selama 1 (satu) tahun. Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 merupakan dokumen yang didasarkan pada perencanaan operasional Renstra BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026, yang disusun guna menjamin konsistensi, keterkaitan, kesesuaian dan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran organisasi perangkat daerah.

Renja Perubahan BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2022 dibuat untuk periode 1 (Satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah berdasarkan rancangan prioritas yang akan dicapai.

Renja BKPSDM disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM, yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4); dan
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur adalah:

1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun 2022;
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan bagi aparatur BKPSDM Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehingga dapat memberikan manfaat bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
3. Sebagai penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur adalah:

1. Untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Luwu Timur;

2. Untuk memberikan gambaran mengenai target kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun anggaran 2022;
3. Untuk menjadi pedoman dan acuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun 2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja, Proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BKPSDM.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kerja Pelayanan BKPSDM
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKD

- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 5.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan
- 5.3 Rencana Tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TA. 2022

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah iktisar yang menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/ kegiatan dan sekaligus merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan catatan atas Laporan Keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam Konsep ini diperlukan indikator input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Indikator masukan (input) yaitu indikator yang menggambarkan segala sesuatu yang dibutuhkan baik berupa sumber dana, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun berupa teknologi dan informasi agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Indikator keluaran (output) yaitu indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun berupa non fisik.
3. Indikator hasil (outcome) yaitu indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

Laporan kinerja dapat dilihat dari 2 (Dua) hal yaitu **pencapaian kinerja output** dan **kinerja keuangannya**.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Luwu Timur

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator Kinerja yang ditetapkan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2022 mengacu pada hasil Laporan Kinerja dan Realisasi APBD BKPSDM Tahun 2022.

Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 3 Program, 14 Kegiatan dan 47 Sub kegiatan dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp3.416.055.726,- atau sebesar 31,92% dari pagu anggaran sebesar Rp10.701.258.050,-, yang terdiri atas :

- Belanja Pegawai sebesar Rp1.300.215.617,- atau sebesar 38,84% dari pagu anggaran sebesar Rp3.347.155.946,-.
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.115.840.109,- atau sebesar 29,18% dari anggaran Rp7.251.017.104,-
- Belanja Modal sebesar Rp0 dari pagu anggaran sebesar Rp103.085.000,-.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja BKPSDM Kabupaten Luwu Timur dan pencapaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran dapat dilihat pada tabel (2.1) berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tw II Tahun 2022		Target dan Realiasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II 2022 (n)						Target Program dan Kegiatan 2022 (Renja Perubahan SKPD) Tahun n	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan				
							Target Renja SKPD Tahun 2022		Realisasi Renja SKPD Tahun 2022 (Tahun n)		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)*100		9		10=(5+7+9)		11=(10/4)*100	
5.03.01.2.0.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100	%	63,85	%	100	%	63,85	%	63,85	%	100	%	100	%	100	%
5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	2	Dokumen	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50	%	7	Dokumen	7	Dokumen	100	%
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	2	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0	%	2	Dokumen	2	Dokumen	100	%
5.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	2	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0	%	2	Dokumen	2	Dokumen	100	%

5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	10	Dokumen	6	Dokumen	10	Dokumen	6	Dokumen	60	%	10	Dokumen	10	Dokumen	100	%
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan Perangkat Daerah	95	%	66,70	%	95	%	66,70	%	70,21	%	95	%	95	%	100	%
5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	34	Orang	26	Orang	31	Orang	26	Orang	84	%	28	orang	28	orang	100	%
5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	7	Dokumen	3	Dokumen	7	Dokumen	3	Dokumen	43	%	13	Dokumen	13	Dokumen	100	%
5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah yang ditatausahakan	100	%	50	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun tepat waktu	1	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	50	%	4	Dokumen	4	Dokumen	100	%
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	52,50	%	100	%	52,50	%	52,50	%	100	%	100	%	100	%
5.03.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang	1	Laporan	2	Laporan	1	Laporan	2	Laporan	50	%	4	Laporan	4	Laporan	100	%

		dimutakhirkan																
5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5	Orang	5	Orang	5	Orang	5	Orang	100	%	9	orang	9	orang	100	%
5.03.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	4	Orang	0	Orang	4	Orang	0	Orang	0	%	0	orang	0	orang	0	%
5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	5	Orang	3	Orang	5	Orang	3	Orang	60	%	13	orang	13	orang	100	%
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	95	%	61,16	%	95	%	61,16	%	64,37	%	95	%	95	%	100	%
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7	Jenis	3	Jenis	7	Jenis	3	Jenis	43	%	7	Jenis	7	Jenis	100	%
5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	Unit	9	Unit	20	Unit	9	Unit	45	%	19	Jenis	19	Jenis	100	%
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang disediakan	21	Jenis	19	Jenis	21	Jenis	19	Jenis	90	%	21	Jenis	21	Jenis	100	%
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	3	Jenis	100	%	3	Jenis	3	Jenis	100	%

5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	48	Eksamplar	24	Eksamplar	48	Eksamplar	24	Eksamplar	50	%	48	Exampler	48	Exampler	100	%
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	623	Orang	221	Orang	623	Orang	221	Orang	35	%	1041	orang	1041	orang	100	%
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	116	Kali	50	Kali	98	Kali	50	Kali	51	%	341	Kali	341	Kali	100	%
5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0	%	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ditatausahakan	100	%	85,29	%	100	%	85,29	%	85,29	%	100	%	100	%	100	%
5.03.01.2.07.05	Pengen Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	17	Unit	12	Unit	17	Unit	12	Unit	70,59	%	23	Unit	23	Unit	100	%
5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	5	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100	%	31	Unit	31	Unit	100	%
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	44,67	%	100	%	44,67	%	44,67	%	100	%	100	%	100	%

5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan keluar yang diadministrasikan	2000	Surat	458	Surat	2000	Surat	458	Surat	22.9	%	2000	Surat	2000	Surat	100	%
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik, dan air yang terbayarkan	36	Rekening	12	Rekening	36	Rekening	12	Rekening	33.33	%	36	Rekening	36	Rekening	100	%
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8	Orang	7	Orang	9	Orang	7	Orang	77.77	%	8	orang	8	orang	100	%
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100	%	102,58	%	100	%	102,58	%	102,58	%	100	%	100	%	100	%
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	%	4	Unit	4	Unit	100	%
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan Dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3	Unit	2	Unit	3	Unit	2	Unit	66.67	%	4	Unit	4	Unit	100	%
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	55	Unit	24	Unit	55	Unit	24	Unit	43.64	%	45	Unit	45	Unit	100	%

5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100	%	1	Unit	1	Unit	100	%
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah ASN yang difasilitasi pengadaan, pemberhentian dan data kepegawaian	95	%	71,60	%	95	%	71,60	%	75,37	%	95	%	95	%	100	%
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan jenis dan Jumlah Jabatan untuk pelaksanaan ASN	Jumlah Rencana Kebutuhan, Jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN yang disusun	4588	Formasi	4820	Formasi	4588	Formasi	4820	Formasi	105	%	4820	Formasi	4820	Formasi	100	%
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Calon CPNS dan PPPK yang akan diterima	868	Orang	530	Orang	868	Orang	530	Orang	61.06	%	1042	Formasi	1042	Formasi	100	%
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Usulan Pemberhentian ASN yang ditindaklanjuti	100	%	36.21	%	100	%	36.21	%	36.21	%	75	orang	75	orang	100	%
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang dimuktahirkan data kepegawaian	5	Aplikasi	5	Aplikasi	5	Aplikasi	5	Aplikasi	100	%	6	Aplikasi	6	Aplikasi	100	%
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dimutasi dan dipromosi	95	%	50,83	%	95	%	50,83	%	53,50	%	95	%	95	%	100	%
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang diangkat dalam jabatan struktur, pelaksanaan dan fungsional	70.50	%	31.89	%	70.50	%	31.89	%	45.23	%	34	%	34	%	100	%

5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase SK Kenaikan Pangkat ASN yang terbit	100	%	97.92	%	100	%	97.92	%	97.92	%	98	%	98	%	100	%
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase jumlah pejabat ASN daerah	95	%	90.50	%	95	%	90.50	%	95.26	%	95	%	95	%	100	%
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	95	%	54,47	%	95	%	54,47	%	57,34	%	90	%	90	%	100	%
5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Pejabat Struktural yang mengikuti Assesment	95	%	5.25	%	95	%	5.25	%	0.06	%	15	%	15	%	100	%
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti	39	Orang	32	Orang	36	Orang	32	Orang	88,89	%	34	Orang	34	Orang	100	%
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional dan jabatan pelaksana	80,99	%	69,19	%	80,99	%	69,19	%	85,43	%	65	%	65	%	100	%
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mendapatkan penilaian dan evaluasi kinerja	90	%	19,85	%	90	%	19,85	%	22,06	%	90	%	90	%	100	%
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%	100	%
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang mendapatkan Reward	100	%	33,72	%	100	%	33,72	%	33,72	%	100	%	100	%	100	%
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase Jumlah Kasus tertangani	100	%	0,39	%	100	%	0,39	%	0,39	%	95	%	95	%	100	%
5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase Jumlah Permohonan	75	%	1,43	%	75	%	1,43	%	1,91	%	50	%	50	%	100	%

		Proses Izin Perceraian pegawai yang terlayani																
5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Persentase Pelanggaran Disiplin ASN yang terselesaikan	100	%	18,85	%	100	%	18,85	%	18,85	%	80	%	80	%	100	%
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang dikembangkan kompetensi teknisnya	100	%	33,33	%	100	%	33,33	%	33,33	%	100	%	100	%	100	%
5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Kompetensi Umum, Inti, dan Pilihan yang diselenggarakan melalui BKPSDM	60	Orang	30	Orang	90	Orang	30	Orang	33,33	%	174	Orang	174	Orang	100	%
5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan	3	Jenis	1	Jenis	3	Jenis	1	Jenis	33,33	%	4	Jenis	4	Jenis	100	%

5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang tersertifikasi dan dikembangkan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional	95	%	93,06	%	95	%	93,06		97,96	%	95	%	95	%	100	%
5.04.02.2.02.01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	4	Jenis	3	Jenis	4	Jenis	3	Jenis	75	%	3	Jenis	3	Jenis	100	%
5.04.02.2.02.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang mengikuti PKP, PKA, PKN, Pelatihan Dasar dan Kompetensi	90	%	100	%	90	%	100	%	111,11	%	75	%	75	%	100	%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja dari sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bisnis proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Luwu Timur yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2021-2026 telah ditetapkan sesuai periode Renstra. Berdasarkan Renstra 2021 – 2026, IKU BKPSDM Kabupaten Luwu Timur sesuai Keputusan Nomor 23 Tahun 2021 mempunyai 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama dan 1 Indikator penunjang yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM 2021-2026

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA OPD	SATUAN	Formulasi	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Sasaran RPJMD Yang Diacu	Sasaran Renstra OPD					
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Disiplin Aparatur	1 Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	%	$\frac{\text{Jumlah ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin}}{\text{Jumlah Keseluruhan ASN}} \times 100$	Laporan Realisasi Kinerja Sub Bidang Kinerja	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Informasi Kepegawaian
		Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia	2 Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	%	$\frac{\text{Jumlah SDM Aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional}}{\text{Jumlah Keseluruhan ASN}} \times 100$	Laporan Realisasi Kinerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur
		Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	3 Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	$\frac{\text{Jumlah Total Capaian Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah Kegiatan Kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota}} \times 100$	Laporan Realisasi Kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan Keuangan	SEKRETARIAT

Pada Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) telah menetapkan 67 (Enam Puluh Tujuh) Indikator Kinerja yang terdiri dari 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 64 (Enam Puluh Empat) Indikator Kinerja (IK) program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun target untuk IKU BKPSDM tahun 2021-2026 tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.2.2
Tujuan dan Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM 2021-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Data Awal (2021)	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2026
			2022	2023	2024	2025	2026	
Cakupan ASN yang tidak Dijatuhi Hukuman Disiplin	%	99,88	99,90	99,95	99,99	100	100	100
Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang Bersertifikat Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	%	80,61	81,82	82,10	83,50	85,00	85,00	85,00
Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota	%	95	96	97	99	99	100	100

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin terealisasi sebesar 98,61%. Dari 4548 orang ASN Kabupaten Luwu Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 terdapat 63 orang yang terjaring tidak disiplin kerja. Artinya terdapat 4485 orang ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin. Sehingga capaian IKU 1 ini tercapai sebesar 98,70% dari target 99,90%.
2. Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat Kompetensi Teknis, Manajerial dan fungsional terealisasi sebesar 39,58%. Jumlah ASN Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan II Tahun 2022 sebanyak 4548 orang dan berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa terdapat 1800 orang ASN yang telah memiliki sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan Fungsional. Realisasi ini masih sangat jauh dari target dikarenakan sasaran target untuk IKU ini pada saat penyusunan Renstra hanya mencakup PNS dan belum mencakup PPPK.
3. Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota terealisasi sampai dengan Triwulan II 2022 sebesar 87,64% dari target 96%. Terdapat 8 kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja program tersebut yang terbagi dalam 28 sub kegiatan dan rata-rata capaiannya sampai dengan triwulan II telah mencapai 87,64%.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Bidang Kepegawaian berdasarkan sesuai Permendagri 86 Tahun 2017, disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.2.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan PERMENDAGRI 86 Tahun 2017

Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Kinerja					Kondisi Akhir 2026
		2021	2022	2023	2024	2025	
Rata - rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	20	20	20	20	20	20
Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	3,26	13,23	20,49	27,73	34,88	35
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	4,07	10,55	24,74	38,82	52,66	53
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan	Orang	33	35	35	35	35	35
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintahan	Orang	787	750	700	700	600	500
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Orang	2800	3300	3450	3600	3750	3900

Capaian IKK sampai dengan tahun 2021 untuk periode Renstra 2021-2026 sebagai berikut:

1. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan terealisasi 9 JP. Pada Tahun 2021 terdapat 7 Jenis Diklat yang diadakan oleh BKPSDM yang anggarannya dibebankan pada Anggaran BKPSDM yang diantaranya terdiri dari Pelatihan RPJMD RENSTRA yang diikuti sebanyak 45 orang ASN selama 6 hari, Diklat pembinaan teknis Desa yang diikuti oleh sebanyak 40 orang ASN, yang dilaksanakan selama 3 hari. Diklat Calon Kepala Sekolah yang diikuti oleh 40 Orang yang dilaksanakan selama 3 bulan. Diklat alih Fungsional penyuluh pertanian diikuti oleh sebanyak 15 orang ASN selama 3 hari, Diklat Costumer care yang diikuti sebanyak 40 orang yang pelaksanaannya selama 3 hari, Diklat Prajabatan yang diikuti oleh 110 CPNS yang dilaksanakan selama 3 bulan, Diklat Pim III yang diikuti oleh sebanyak 5 orang pejabat struktural yang pelaksanaannya selama 3 bulan. Untuk semua jenis kegiatan diklat rata-rata jumlah waktu yang digunakan adalah 9 JP (Jam Pelajaran) untuk setiap orang ASN.
2. Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal terealisasi sebesar 7,50% dari target 3,26% (Melebihi target). Dari 3935 orang ASN Kabupaten Luwu Timur terdapat 295 Orang ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan menggunakan anggaran BKPSDM.
3. Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural terealisasi sebesar 1,39% (tidak mencapai target). Pada tahun 2021, dari 361

Pejabat Struktural hanya terdapat 5 orang ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.

4. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintahan terealisasi sebanyak 30 jabatan dari target 33 Jabatan (Tidak mencapai target);
5. Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintahan terealisasi sebanyak 817 jabatan dari target 787 Jabatan (Melebihi target).
6. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah terrealisasi sebanyak 2757 orang dari target 2800 orang (Tidak mencapai target).

Tabel 2.2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Luwu Timur

No.	Indikator Kinerja Utama	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKPSDM				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	Tahun 2020 (Thn n-2)	Tahun 2021 (Thn n-1)	Tahun 2022 (Thn n)	Tahun 2023 (Thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				95%	96%	97%		92,37%	96%	97%	
2	Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin				99,88%	99,90%	99,95%			99,90%	99,95%	
3	Persentase sumber daya manusia aparatur yang mempunyai sertifikat kompetensi teknis, manajerial dan fungsional				80,61%	81,82%	82,10%			81,82%	82,10%	

Kedudukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah sebagai unsur penunjang dibidang pengelolaan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penempatan pegawai, perumusan dan pengembangan aparatur serta tugas pembantuan yang ditugaskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2020, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKPSDM mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian, kinerja dan informasi kepegawaian;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi, kepangkatan dan pengembangan karir;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya aparatur;
- d. Pelaksanaan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur sebagai lem serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur. Susunan organisasi tersebut terdiri dari:

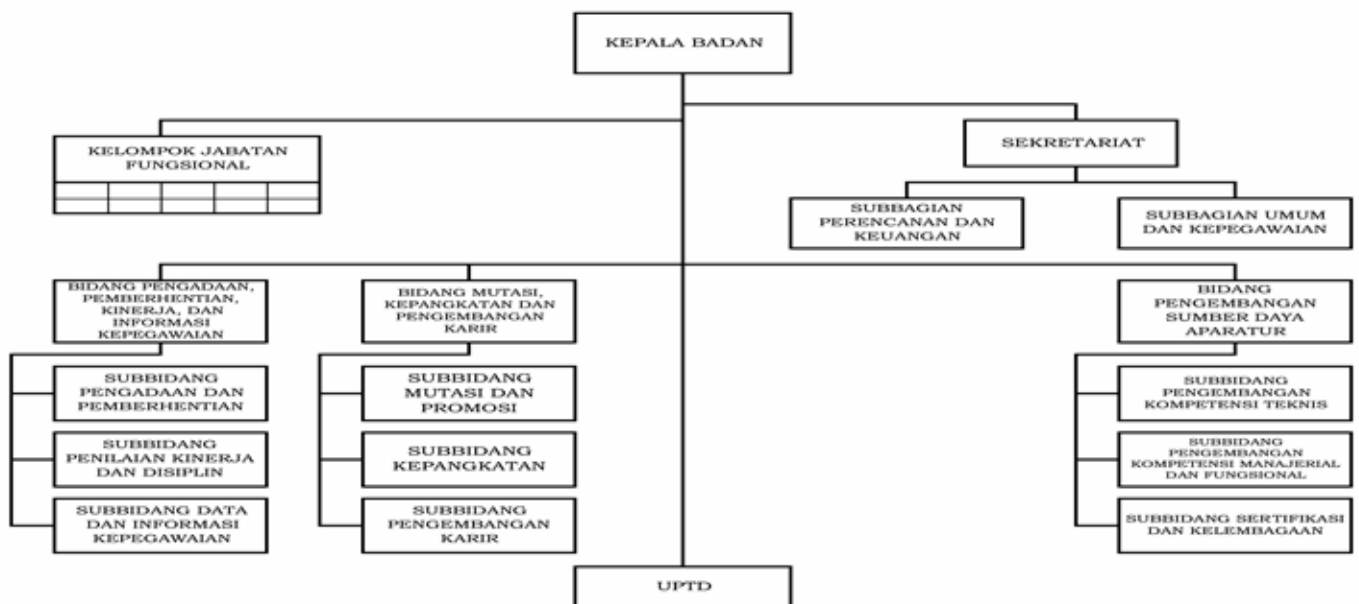
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja, dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas:
 1. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 2. Subbidang Penilaian Kinerja dan Pembinaan Disiplin; dan
 3. Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian.
- d. Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Pengembangan Karir, terdiri atas:
 1. Subbidang Mutasi dan Promosi;
 2. Subbidang Kepangkatan; dan
 3. Subbidang Pengembangan Karir.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
 1. Subbidang Pengembangan Kompetensi Teknis;

2. Subbidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional; dan
 3. Subbidang Sertifikasi dan Kelembagaan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Berjalannya organisasi BKPSDM sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya saat ini BKPSDM didukung oleh pegawai sebanyak 26 orang PNS dan 22 orang Tenaga Upah Jasa dengan profil demografi disajikan pada tabel 2.2.8; 2.2.9; 2.2.10 dan 2.2.11; dan 2.2.12

Tabel 2.2.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Badan	1						1
2	Sekretariat	1	4		2			7
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1	2					3
4	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Informasi Kepegawaian		7					7
5	Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Pengembangan Karir		6	1	1			8
6	Tenaga Fungsional							
Jumlah		3	19	1	3	0	0	26

Tabel 2.2.6
Jumlah Pegawai Non PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Sekretariat		4	1	4		1	10
2	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur		3					3
3	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan Informasi Kepegawaian		6					6
4	Bidang Mutasi, Kepangkatan, dan Pengembangan Karir		2		1			3
Jumlah		0	15	1	5		1	22

Tabel 2.2.7
Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Unit Kerja	Tingkat Golongan / Kepangkatan					
		IV	III	II	I	PTT	Jumlah
1	Kepala Badan	1					1
2	Sekretariat	1	4	2			7
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur		3				3
4	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan informasi Kepegawaian		7				7
5	Bidang Mutasi, Kepegawaian, dan Pengembangan Karir		7	1			8
6	Tenaga Fungsional						
Jumlah		2	21	3	0	0	26

Tabel 2.2.8
Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Unit Kerja	Tingkat Eselon					
		II.b	III.a	III.b	IV.a	Staf PNS	Staf PTT
1	Kepala Badan	1					
2	Sekretariat		1		1	5	
3	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur			1		2	
4	Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kinerja dan informasi Kepegawaian			1		2	
5	Bidang Mutasi dan Data Kepegawaian			1		3	
6	Tenaga Fungsional						
Jumlah		1	1	3	1	12	

Tabel 2.2.9
Jumlah Pegawai BKPSDM Berdasarkan Jabatan Fungsional

No.	Unit Kerja	Tingkat Fungsional					
		III/a	III/b	III/c	III/d	Staf PTT	Jumlah
1	Kepala Badan						
2	Sekretariat						
	Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur						
3	Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Kepegawaian		1	2	1		4
4	Bidang Mutasi, Kepangkatan Dan Pengembangan Karir	1	1	2			4
5	Tenaga Fungsional						
Jumlah		1	2	4	1		8

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM Kab. Luwu Timur

Perencanaan pembangunan jangka menengah OPD tahun 2021 – 2026 pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan tindakan selama 5 (lima) tahun kedepan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah nasional dan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, menjadikan RPJMD sebagai rujukan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dalam setiap tahun anggaran.

Isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak serta menentukan tujuan di masa yang akan datang. Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan SKPD. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan pembinaan dan administrasi pelayanan kepegawaian baik internal maupun eksternal, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan telaahan rencana strategis dari kementerian atau lembaga terkait dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga dapat merumuskan isi-isu strategis BKPSDM Kabupaten Luwu Timur.

Isu-isu strategis pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kab. Luwu Timur adalah:

1. Keterbatasan SDM Pelayanan Kepegawaian;
2. Berkurangnya jumlah pegawai setiap tahunnya karena pensiun;
3. Keterbatasan rekrutmen CPNS setiap tahunnya;
4. Database Kediklatan yang belum memadai;
5. Terbatasnya kuota pengembangan kompetensi bagi ASN setiap tahunnya;
6. Belum tersedianya data kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan diklat
7. Belum optimalnya implementasi Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Belum optimalnya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Masih kurangnya tingkat kedisiplinan Aparatur Sipil Negara;
10. Masih rendahnya pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
11. Masih rendahnya dukungan anggaran untuk meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan teknis sesuai amanat Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2009 tentang Manajemen Pegawai;
12. Adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan permendagri 90 tahun 2019 yang dimuktahirkan oleh Kepmen 050-3708 Tahun 2020
13. Penerimaan ASN (CPNS dan PPPK) adalah kewenangan pusat sehingga pelaksanaannya tetap mengacu pada jadwal yang ditetapkan oleh Menpan

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa keberadaan BKPSDM Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penunjang pelaksana Pemerintah Kabupaten di Bidang Kepegawaian ASN daerah Kabupaten Luwu Timur, maka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKPSDM terdapat beberapa hal tantangan yang dihadapi BKPSDM dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan yang dihadapi:

1. Rendahnya tingkat kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara
2. Kurangnya Disiplin Apartur Sipil Negara
3. Belum Maksimalnya pelayanan Kepegawaian
4. Minimnya Kegiatan Diklat Teknis dan Struktural yang dilaksanakan
5. Kurangnya kesadaran Aparatur Sipil Negara terhadap tugas dan tanggungjawabnya
6. Kurangnya partisipasi Aparatur Sipil Negara dalam melengkapi Data Kepegawaian
7. Anggaran yang terus mengalami penurunan setiap tahun

Peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi tentang peraturan Kepegawaian pada ASN;
2. Diterapkannya peraturan pemerintah tentang ASN;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur sipil negara melalui Pendidikan dan pelatihan fungsional, tehknis, dan pelatihan manajerial;
4. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada; dan

5. Mengoptimalkan sistem pengolahan data, akses dan informasi serta komunikasi jaringan elektronik untuk keperluan manajemen Kepegawaian.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan program dan kegiatan yang ada pada rancangan awal RKPD tahun 2022 terhadap hasil analisis kebutuhan program dan kegiatan, perbedaan pada target pencapaian dan pagu indikatif terhadap kebutuhan dana pada program kegiatan BKPSDM. Namun tetap menjadi perhatian bahwa target capaian dan pagu masih bisa mengalami perubahan karena pertimbangan prioritas program kegiatan dan hasil capaian pada tahun sebelumnya.

Dengan demikian perbedaan antara target capaian, pagu indikatif terhadap kebutuhan dana yang menjadi catatan penting untuk diperhatikan bagi SKPD. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Luwu Timur

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	TARGET Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	pesentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran	96 %	4,119,560,432	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	pesentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran	96 %	4,457,101,026	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	10 0%	65,736,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	10 0%	105,981,200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	20,573,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	7	22,488,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2	6,290,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2	3,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun (Dokumen)	2	6,010,000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10	39,163,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	10	71,193,200	

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	95 %	3,179,755,570	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	3,083,910,084	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	34	3,134,714,816	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	28	2,995,774,084	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun (Dokumen)	7	45,040,754	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang disusun (Dokumen)	13	88,136,000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	100 %	9,547,037	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	100 %	18,144,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	1	9,547,037	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)	1	18,144,000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan	100 %	119,160,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Data dan Informasi Pegawai Perangkat Daerah yang diadministrasikan	100 %	191,250,000	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian		Jumlah Laporan Data Administrasi Kepegawaian yang dimutakhirkan (Laporan)	1	14,500,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian		Jumlah Laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	1	13,760,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)	5	38,350,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)	7	53,690,000	

	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	4	26,970,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan (orang)	3	21,860,000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	5	39,340,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	13	101,940,000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	95 %	351,057,695	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	540,951,460	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	7	10,199,300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)	7	10,349,300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	20	30,098,800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)	21	51,887,050	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	21	10,003,600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	19	8,615,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan (jenis)	3	20,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang diadakan (jenis)	3	19,129,700	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	48	5,100,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (eksamplar)	48	5,100,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	623	18,595,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)	446	13,150,000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	116	236,653,400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)	302	429,038,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	20,407,595	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Laporan Hasil Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	3,682,410	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%	105,785,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	100%	153,048,525	
	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan (unit)	17	53,085,000	Pengadaan Mebel		Jumlah mebel yang diadakan (unit)	18	74,235,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	5	52,700,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)	6	78,813,525	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	212,959,830	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100%	205,487,407	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	2,000	35,839,830	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	2,000	35,367,407	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	36	51,120,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	36	51,120,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (Orang)	8	126,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (Orang)	8	119,000,000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100%	75,559,300	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	100%	158,328,350	

			daerah yang dipelihara					daerah yang dipelihara			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	1	21,350,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dipelihara (unit)	1	37,700,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	3	9,780,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	4	17,814,630	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	55	29,180,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	45	23,180,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi (Unit)	1	15,249,300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi (Unit)	1	79,633,720	
I	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	96	4,894,347,703	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang memiliki data kepegawaian yang akurat	100	4,279,200,894	
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang difasilitasi pengadaan, pemberhentian dan data kepegawaian	95	764,137,798	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang difasilitasi pengadaan, pemberhentian dan data kepegawaian	90%	812,637,654	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN yang disusun	4,588	50,078,000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN yang disusun	4,820	70,088,000	

			(Formasi)					(Formasi)			
	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Calon CPNS dan PPPK yang akan diterima (Orang)	868	504,550,093	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Calon CPNS dan PPPK yang akan diterima (Orang)	1,042	438,590,093	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Persentase Pelayanan Pemberhentian ASN Tepat Waktu (Persen)	100	84,054,844	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah usulan pemberhentian ASN yang ditindaklanjuti (Orang)	75	84,114,700	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dikelola (Aplikasi)	5	25,454,861	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dikelola (Aplikasi)	5	219,844,861	
2	Mutasi dan Promosi ASN	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang di mutasi dan promosi	95%	1,006,031,184	Mutasi dan Promosi ASN	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang di mutasi dan promosi	90%	822,978,800	
	Pengelolaan Mutasi ASN		Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (Persen)	70.50	229,678,965	Pengelolaan Mutasi ASN		Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (Persen)	35	168,273,800	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Persentase SK Kenaikan Pangkat ASN yang Terbit (Persen)	100	310,543,144	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Persentase SK Kenaikan Pangkat ASN yang Terbit (Persen)	98	287,428,000	
	Pengelolaan Promosi ASN		Persentase Jumlah Pejabat ASN daerah (Persen)	95	465,809,075	Pengelolaan Promosi ASN		Persentase Jumlah Pejabat ASN daerah (Persen)	95	287,428,000	
3	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	95%	2,846,996,921	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	90%	2,369,903,500	

	Pengelolaan Assessment Center		Persentase Jumlah Pejabat Struktural Yang Mengikuti Assement (Persen)	95	93,642,319	Pengelolaan Assessment Center		Persentase Jumlah Pejabat Struktural Yang Mengikuti Assement (Persen)	15	293,282,100	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan (Orang)	39	2,692,744,867	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mengikuti Pendidikan Lanjutan (Orang)	32	2,016,012,000	
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (Persen)	80.99	60,609,735	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) (Persen)	70	60,069,400	
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja	Persentase ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja	90%	277,181,800	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja	Persentase ASN yang mendapat penilaian dan evaluasi kinerja	90%	273,680,940	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Jumlah Pegawai yang dinilai dan dievaluasi Kinerjanya (Persen)	100	50,000,000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Jumlah Pegawai yang dinilai dan dievaluasi Kinerjanya (Persen)	100	67,500,000	
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Persentase Jumlah Piagam Penghargaan Pegawai yang Terbit (Persen)	100	80,499,895	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Persentase Jumlah Piagam Penghargaan Pegawai yang Terbit (Persen)	100	64,499,615	
	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah kasus Disiplin ASN yang tertangani (Persentase)	100	49,998,380	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah kasus Disiplin ASN yang tertangani (Persentase)	100	56,997,800	
	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Persentase Jumlah Permohonan Proses Izin Perceraian Pegawai yang Terlayani (Persen)	75	38,425,000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Persentase Jumlah Permohonan Proses Izin Perceraian Pegawai yang Terlayani (Persen)	50	23,425,000	

	Evaluasi Disiplin ASN		Persentase Pelanggaran Disiplin ASN yang terselesaikan (Persen)	100	58,258,525	Evaluasi Disiplin ASN		Persentase Pelanggaran Disiplin ASN yang terselesaikan (Persen)	80	61,258,525	
I I I	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang lulus dan meningkatkan kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui diklat	20	1,690,825,915	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang lulus dan meningkatkan kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi melalui diklat	100	1,964,956,130	
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensi teknisnya	100%	872,490,126	Pengembangan Kompetensi Teknis	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensi teknisnya	100%	1,242,724,330	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan yang diselenggarakan melalui BKPSDM (Orang)	60	789,830,126	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan yang diselenggarakan melalui BKPSDM (Orang)	174	1,060,964,330	
	Pembinaan, Penguasaan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Diklat Kompetensi Teknis UMum, Inti, dan Pilihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM (Jenis)	3	82,660,000	Pembinaan, Penguasaan, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		Jumlah Diklat Kompetensi Teknis UMum, Inti, dan Pilihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM (Jenis)	4	181,760,000	

2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang tersertifikasi, dan dikembangkan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional	95 %	818,335,789	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Kec. Malili, Kab. Luwu Timur	Persentase ASN yang tersertifikasi, dan dikembangkan Kompetensi, Manajerial dan Fungsional	95 %	722,231,800	
	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dilaksanakan melalui BKPSDM kab. Luwu Timur (Jenis)	4	10,001,000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional		Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang dilaksanakan melalui BKPSDM kab. Luwu Timur (Jenis)	3	6,701,000	
	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota		Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi dan tugas belajar (Orang)	-	-	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota		Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi dan tugas belajar (Orang)			
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan structural (Persen)	90	808,334,789	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan structural (Persen)	90	715,530,800	
Jumlah					10,704,734,050	Jumlah					10,701,258,050

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dari usulan para pemangku kepentingan, dari kelompok masyarakat terkait langsung langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun SKPD Kabupaten yang langsung di tujukan kepada SKPD provinsi maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan forum SKPD tahun 2022 belum ada kegiatan yang merupakan usulan dari pemangku kepentingan sebagaimana terlihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan tahun 2022
Kabupaten Luwu Timur

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Keterangan: Tidak ada tambahan usulan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Luwu Timur yang berasal dari forum SKPD/hasil jarring aspirasi/usulan masyarakat/hasil reses DPRD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, secara operasional bidang kepegawaian tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian. Adapun program nasional yang dilaksanakan BKPSDM termasuk dalam urusan wajib program peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

Salah satu program wajib tersebut lebih menekankan pada kebutuhan daerah para penyelenggara pemerintahan yaitu ASN, sehingga kebutuhan akan ASN di daerah belum terakomodir oleh kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan kebijakan kepegawaian tersebut membawa akibat terhadap masih banyaknya tenaga-tenaga tertentu yang di butuhkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur melalui kajian Bezetting termasuk PNS yang masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi kekurangan tersebut harus berdasarkan persetujuan pemerintah pusat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Timur

Tujuan dan sasaran rencana kerja BKPSDM Kabupaten Luwu Timur yaitu:

- a. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan BKPSDM Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022
- b. Menjadi acuan bagi seluruh Bidang dan Sekretariat BKPSDM Kabupaten Luwu Timur
- c. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program/kegiatan antara Bidang dan Sekretariat pada BKPSDM Kabupaten Luwu Timur
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran BKPSDM Kabupaten Luwu Timur.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, BKPSDM menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan yakni:

“Mewujudkan sumber Daya Manusia aparatur yang berkualitas”

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas, maka sasaran jangka menengah BKPSDM Kabupaten Luwu Timur di jabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas ASN melalui Diklat;
2. Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian;
3. Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah

Yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:

1. Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
2. Visi Kementerian PAN RB
3. Visi BKN Pusat
4. Visi dan Misi BKPSDM Kabupaten Luwu Timur
5. Usulan dari pemangku kepentingan dari kelompok masyarakat.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Indeks Profesional ASN	1 Meningkatnya Disiplin Aparatur	1 Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin	99,90%
			2 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	2 Persentase Sumber Daya Manusia Aparatur yang bersertifikat Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional	81,82%
			3 Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	3 Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan pemerintahan	96%

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BKPSDM Kabupaten Luwu Timur menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2022 Berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 / Kepmen 050-3708 Tahun 2020, menguraikan dalam 3 (Tiga) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 47 (Empat Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran Perubahan sebesar Rp10.748.258.050,- dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
BELANJA			
BELANJA OPERASI	10.598.173.050	10.473.841.525	(124.331.525)
Belanja Pegawai	3.347.155.946	2.861.711.243	(485.444.703)
Belanja Barang dan Jasa	7.251.017.104	7.612.130.282	361.113.178
BELANJA MODAL	103.085.000	274.416.525	171.331.525
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	103.085.000	274.416.525	171.331.525
Jumlah Belanja	10.701.258.050	10.478.258.050	47.000.000

Tabel 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022								Catatan Penting		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
						Ca pai an Pr og ra m	Kelu aran Sub Kegi atan	Hasil Kegia tan	Loka si Outp ut Kegi atan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumb er Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/	
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Tolo k Uku r				Targ et	Pagu Indikatif (Rp.)		
											S e b el um	S e s u da h	Sebel um	Ses uda h		Sebel um	Sesuda h	Sebelum			Sesudah	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	3				KEPEGAWAIAN									9,071,124,920	8,778,301,920			10,085,783,000				
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar			96 %	96 %					4,270,790,059	4,457,101,026		97%	97%	4,681,542,300	
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan.					100%	100%		63,066,000	105,981,200		100 %	100 %	51,000,000		
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu		Kab. Luwu Timur , Malili Punc				2 Dok	7 Dok			17,903,000	22,488,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH	2 Dok	2 Dok	20,000,000

							ak Indah									(PAD)			
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili Puncak Indah			2 Dok	2 Dok			3,000,000	6,290,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dok	2 Dok	3,000,000
5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili Puncak Indah			2 Dok	2 Dok			3,000,000	6,010,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dok	2 Dok	3,000,000
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili Puncak Indah			10 Dok	10 Dok			39,163,000	71,193,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Dok	10 Dok	25,000,000
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan						95%	95%	3,352,832,982	3,083,910,084		95%	95%	3,271,912,300
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncak Indah			34 Orang	28 Orang			3,307,975,946	3,307,975,946	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	30 orang	30 orang	3,226,912,300

5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu				7 Dok	13 Dok			44,857,036	88,136,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Dok	7 Dok	45,000,000
5	3	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar						100 %	100 %	9,484,360	18,144,000		100%	100%	10,000,000
5	3	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			1 Dok	4 Dok			9,484,360	18,144,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dok	1 Dok	10,000,000
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah						100 %	100 %	119,160,000	191,250,000		100%	100%	120,850,000
5	3	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			1 Laporan	4 Laporan			14,500,000	13,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000
5	3	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			5 Orang	9 Orang			38,350,000	53,690,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	5 Orang	38,350,000

5	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Luwu Timur , Malili, Puncuk Indah			4 Orang	0			26,970,000	21,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Orang	4 Orang	37,500,000
5	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Luwu Timur , Malili, Puncuk Indah			5 Orang	13 Orang			39,340,000	101,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	5 Orang	30,000,000
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah						95%	95%	320,015,010	540,951,460		95%	95%	345,400,000
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			7 Jenis	7 Jenis			10,199,300	10,349,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Jenis	7 Jenis	10,200,000
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			20 Unit	19 Jenis			30,098,800	51,887,050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Unit	20 Unit	30,000,000
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			21 Jenis	21 Jenis			10,003,600	8,615,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Jenis	20 Jenis	10,000,000

5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			3 Jenis	3 Jenis			20,095,700	19,129,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Jenis	3 Jenis	21,000,000
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			48 Exemplar	48 Exemplar			5,100,000	5,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	48 Eks	48 Eks	5,200,000
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			623 Orang	1041 Orang			18,595,000	13,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	650 Orang	650 Orang	19,000,000
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			98 Kali	341 Kali			205,520,200	429,038,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140 Kali	140 Kali	255,249,600
5	3	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			1 Dok	1 Dok			20,402,410	3,682,410	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dok	1 Dok	20,000,000
5	3	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang terpenuhi						100 %	100 %	105,785,000	153,048,525		100%	100%	590,000,000

RENCANA KERJA PERUBAHAN BKPSDM_TAHUN 2022

5	3	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kenaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan (Unit)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			0	0			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	1 Unit	500,000,000
5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			17 Unit	18 Unit			53,085,000	74,235,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	17 Unit	17 Unit	40,000,000
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			5 Unit	31 Unit			52,700,000	78,813,525	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Unit	5 Unit	50,000,000
5	3	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %			224,487,407	205,487,407		100 %	100 %	211,880,000
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			200 Surat	200 Surat			35,367,407	35,367,407	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2000 Surat	2000 Surat	35,000,000
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			36 Rekening	36 Rekening			51,120,000	51,120,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36 Rekening	36 Rekening	50,880,000

5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dbayarkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			9 Orang	8 Orang			138,000,000	119,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Orang	8 Orang	126,000,000
5	3	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik						100 %	100 %	75,959,300	158,328,350		100 %	100 %	80,500,00
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan yang dipelihara dan terbayarkan pajaknya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			1 Unit	4 Unit			21,350,000	37,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Unit	2 Unit	25,000,000
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			3 Unit	4 Unit			10,180,000	17,814,630	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Unit	3 Unit	10,000,000
5	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			55 Unit	45 Unit			29,180,000	23,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	55 Unit	55 Unit	30,000,000

5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			1 Unit	1 Unit			15,249,300	79,633,720	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	1 Unit	15,500,000
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan ASN yang tidak dijatuhi hukuman disiplin		96 %	96 %	4,800,334,861				4,279,200,894		97%	97%	5,404,244,000	
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase rata-rata capaian kinerja pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN					95%	95 %	735,117,654	812,637,654		95%	95%	960,000,000	
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN yang disusun	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			4,588 Formasi	4,820 Formasi			50,078,000	70,088,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3,720 Formasi	3,720 Formasi	200,000,000
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Usulan Calon PNS dan PPPK yang akan diterima	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			868 Orang	1042 Formasi			481,140,093	438,590,093	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	868 Orang	800 Orang	510,000,000
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Pelayanan pemberhentian ASN tepat waktu	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			100 %	75 Orang			84,054,700	84,114,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	100%	105,000,000

5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dikelola	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			5 Aplikasi	6 Aplikasi			119,844,861	219,844,861	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Aplikasi	5 Aplikasi	25,000,000
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Jumlah Data pegawai yang dimutakhirkan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			0	0			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	100%	125,000,000
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase rata-rata capaian pengelolaan mutasi dan promosi ASN						95%	95%	936,399,900	822,978,800		95%	95%	900,000,000
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			70.5 %	34%			188,368,800	168,273,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70,98%	70,98%	150,000,000
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase SK kenaikan pangkat ASN yang terbit	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			100 %	98%			310,542,000	367,277,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	100 %	300,000,000
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Persentase jumlah pejabat ASN Daerah	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			95%	95%			437,489,100	287,428,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	97%	97%	450,000,000
5	3	2	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase rata-rata capaian pengembangan kompetensi ASN						95%	95%	2,851,636,367	2,369,903,500		95%	95%	3,253,744,000
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Persentase	Kab. Luwu			95%	15%			293,282,100	293,282,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	95%	95%	500,000,000

						pejabat struktural yang mengikuti Assessment	Timur, Malili, Puncuk Indah									AN ASLI DAERAH (PAD)			
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan lanjutan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			36 Orang	34 Orang			2,497,744,867	2,016,012,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39 Orang	39 Orang	2,692,744,000
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			80.99%	65%			60,609,400	60,609,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	84,26%	84,26%	61,000,000
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase rata-rata capaian penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	90%	90%	277,180,940	273,680,940		95%	95%	290,500,000	5	3	2	2.04	
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase jumlah pegawai yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			100%	100%			50,000,000	67,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	100%	75,000,000
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase jumlah piagam penghargaan yang terbit	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			100%	100%			80,499,615	64,499,615	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100%	100%	80,500,000
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase jumlah kasus disiplin ASN	Kab. Luwu Timur, Malili,			100%	95%			49,997,800	56,997,800	PENDAPATAN ASLI	100%	100%	10,000,000

						yang tertangani	Puncu k Indah									DAER AH (PAD)			
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Persentase jumlah permohonan proses izin perceraian pegawai ynag terlayani	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncu k Indah			75%	50%			38,425,000	23,425,000	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	75%	75%	45,000,000
5	3	2	2.04	10	Evaluasi Disiplin ASN	Persentase pelanggaran disiplin ASN yang terselesaikan	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncu k Indah			100 %	80%			58,258,525	61,258,525	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	100 %	100 %	80,000,000
5	4				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								1,630,133,130	1,964,956,130				2,460,700,000	
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20JP/Tahun		20 %	20 %					1,630,133,130	1,964,956,130				2,460,700,000
5	4	2	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase jumlah ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan kompetensi teknis melalui BKPSDM						95%	95 %	872,489,330	1,242,724,330		100 %	100 %	1,251,600,000
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti diklat kompetensi teknis umum, inti dan pilihan yang diselenggarakan melalui BKPSDM	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncu k Indah			60 Ora ng	174 Ora ng			789,829,330	1,060,964,330	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	56 Ora ng	56 Ora ng	1,107,600,000
5	4	2	2.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan	Jumlah diklat kompetensi	Kab. Luwu Timur,			3 Jeni s	4 Jeni s			82,660,000	181,760,000	PEND APAT AN	3 Jeni	3 Jeni s	144,000,000

					Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Teknis Umum, Inti dan Pilihan yang dilaksanakan oleh BKPSDM	Malili, Puncuk Indah									ASLI DAERAH (PAD)	s		
5	4	2	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					95%	95%	757,643,800	722,231,800		95%	95%	1,209,100,000	
5	4	2	2.02	1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional	Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional yang dilaksanakan melalui BKPSDM Kab. Luwu Timur	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			4 Jenis	3 Jenis		10,001,000	6,701,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Jenis	4 Jenis	16,000,000	
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Kab. Luwu Timur, Malili, Puncuk Indah			90%	75%		747,642,800	715,530,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	93%	93%	1,193,100,000	
TOTAL													10,701,258,050	10,701,258,050	12,546,486,300				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara garis besar rekapitulasi program dan kegiatan yang menggambarkan jumlah program, jumlah kegiatan, serta alokasi kebutuhan dana Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaa BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2022

No.	Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2022		
		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	96%	4,487,061,026	PAD
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	136,042,300	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7	22,287,000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	4,225,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (Dokumen)	2	4,240,000	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	10	105,290,300	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,918,457,161	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	28	2,821,031,243	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	97,425,918	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	15,744,000	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	15,744,000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	130,330,000	
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Laporan)	4	14,360,000	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Orang)	9	54,030,000	
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	

4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	13	61,940,000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	643,634,290	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)	7	13,069,300	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	19	58,090,800	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21	12,810,000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Jenis)	3	21,045,700	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Eksamplar)	48	5,100,000	
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Orang)	341	31,985,000	
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Kali)	1041	493,438,000	
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	8,095,490	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	276,816,525	
1	Pengadaan Mebel (Unit)	18	64,855,000	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	31	211,961,525	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	204,908,400	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Surat)	2,000	34,788,400	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Rekening)	36	51,120,000	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Orang)	8	119,000,000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	161,128,350	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)	4	42,500,000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (Unit)	4	17,814,630	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Unit)	45	21,180,000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Unit)	1	79,633,720	
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	96%	4,291,240,894	PAD

1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	95%	753,277,654	
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Formasi)	4,820	71,786,000	
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Formasi)	1042	392,592,093	
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Orang)	75	128,884,700	
4	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Aplikasi)	6	160,014,861	
2	Mutasi dan Promosi ASN	95%	797,538,800	
1	Pengelolaan Mutasi ASN (Persen)	34	142,893,800	
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Persen)	98	367,277,000	
3	Pengelolaan Promosi ASN (Persen)	95	287,368,000	
3	Pengembangan Kompetensi ASN	95%	2,419,803,500	
1	Pengelolaan Assessment Center (Persen)	15	313,937,100	
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN (Orang)	34	2,001,562,000	
3	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional (Persen)	65	104,304,400	
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	90%	320,620,940	
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Persen)	100	132,250,000	
2	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai (Persen)	100	51,439,615	
3	Pembinaan Disiplin ASN (Persen)	95	57,797,800	
4	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai (Persen)	50	20,375,000	
5	Evaluasi Disiplin ASN (Persen)	80	58,758,525	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20%	1,969,956,130	PAD
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	1,247,724,330	
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Orang)	174	1,065,964,330	

2	Pembinaan, Penguordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Dokumen)	4	181,760,000	
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	95%	722,231,800	
1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta jabatan Fungsional (Jenis)	4	6,701,000	
2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Persen)	75	715,530,800	
JUMLAH			10,748,258,050	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja disusun agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BKPSDM Kabupaten Luwu Timur secara efektif dan efisien dengan memperhatikan dan mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya yaitu RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra SKPD. Renja tersebut selanjutnya dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD tahun 2022.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja Tahun 2022 sangat dibutuhkan dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak begitupun dukungan dari segi penganggaran karena tanpa anggaran yang cukup tentunya akan ada beberapa kegiatan termasuk program nasional yang akan tertunda atau tidak dapat dilaksanakan yang berakibat tidak optimalnya capaian kinerja BKPSDM.

Dalam pelaksanaan Renja BKPSDM Kab. Luwu Timur Tahun 2022 tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan seperti hasil evaluasi capaian kinerja tahun lalu, masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta keberlanjutan dan konsistensi pembangunan.

Adapun rencana tindak lanjut dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2022 yaitu dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu atau mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan dan sesuai amanat peraturan yang berlaku, melakukan evaluasi target kinerja dan anggaran tahun sebelumnya sebagai bahan selanjutnya, perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.

Kami menyadari penyusunan renja ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga saran, kritikan konstruktif sangat kami butuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberi Rahmat, Hidayah dan kekuatan untuk bekerja secara ikhlas, cermat, tuntas dan professional sehingga menuntun kita kejalan kebenaran. Aamiin

Malili, 20 Juli 2022

KEPALA BKPSDM

Dra. ROSMIYATI ALWY, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650110 198602 2 004



Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)
Meningkatnya kualitas pelayanan public (S9)

BKPSDM LUWU TIMUR SIAP

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur

